

LAPORAN TAHUNAN 2008

Daftar Isi

1	Situasi Nasional	2
2	Kegiatan Arus Pelangi	3
2.1	Diskusi Publik	3
2.1.1	Diskusi Publik Mengenai Islam dan Homoseksualitas	3
2.1.2	Peluncuran dan Bedah Buku	4
2.2	Advokasi	4
2.2.1	Advokasi Kasus	4
2.2.1.1	Kasus Hartoyo	4
2.2.1.2	Kasus Elly Susana	5
2.2.1.3	Kasus Ryan dari Jombang	5
2.2.1.4	Kasus Michelle Saraswati	6
2.2.1.5	Kasus-kasus Lainnya	6
2.2.2	Reformasi Hukum	6
2.2.2.1	UU Pornografi	6
2.2.2.2	Peraturan Daerah yang Diskriminatif	7
2.2.2.3	Hukum Anti Diskriminasi	7
2.2.2.4	KUHP yang Baru	7
2.3	Kegiatan Jaringan	8
2.3.1	ILGA	8
2.3.2	Forum Nasional LGBTIQ	8
2.3.3	Hari Buruh	8
2.3.4	IDAHO	8
2.3.5	International Transgender Day	9
2.3.6	Deklarasi Yogyakarta Principles	9
2.4	Pengorganisasian Kelompok LGBT Lokal	9
2.5	Pendidikan terhadap Isu-Isu LGBT	9
2.6	Penguatan Keorganisasian	10
3	Kesimpulan	10
4	Isu-isu di Masa Datang	10

1 Situasi Nasional

Pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang cukup stabil dan moderat telah menciptakan iklim yang bersahabat bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintahan ini dikenal tidak berani menyentuh isu-isu sensitif. Contoh paling nyata adalah kebijakan mengenai keberadaan aliran Ahmadiyah. Banyak kelompok Islam yang meneriakan pelarangan aliran tersebut karena dinilai menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang benar. Pada akhirnya, pemerintah tidak sampai melarang total, tapi memerintahkan aliran tersebut menghentikan semua aktivitasnya yang berkaitan dengan ibadah. Kurangnya visi dan keberanian inilah juga yang menimpa perjuangan hak-hak LGBT.

Tahun 2008 dikenang sebagai Tahun Pornografi dan meningkatnya kekangan terhadap seksualitas. Perlawanan terhadap RUU Pornografi dan Pornoaksi tahun 2006 berhasil menghilangkan RUU ini dari permukaan, dan tampaknya butuh waktu lebih lama lagi untuk mendapatkan momentum yang baru. Benar saja karena isu ini tidak terdengar di tahun 2007. Namun pada pertengahan 2008, DPR kembali mengajukan RUU baru yang kali ini bernama RUU Pornografi. Walau banyak perubahan mendasar dari RUU yang lama, namun RUU baru ini masih banyak menyisakan elemen-elemen diskriminatif; sebagai contoh, pada penjelasan paragraf no. 4, definisi 'persetubuhan yang menyimpang' memasukkan oral seks dan anal seks, ditambah persetubuhan lesbian dan homoseksual [sejajar dengan persetubuhan dengan binatang dan mayat].

Kelompok-kelompok sipil yang sama, yang menentang RUU sebelumnya, kembali berkoalisi menentang RUU kali ini. Berbagai kampanye tandatangan, diskusi publik, dan jumpa pers diselenggarakan dan diliput oleh media secara berimbang. Pada akhirnya koalisi ini melakukan aksi unjuk rasa. Namun kesemua ini tidak dapat memungkiri fakta bahwa kelompok pro RUU (umumnya organisasi massa Islam) masih lebih keras bersuara.

Koalisi warga sipil seperti dijelaskan barusan, berjalan paralel dengan koalisi Pemda (pemerintahan daerah) yang juga menentang RUU Pornografi. Di antaranya adalah Pemda: Bali, Papua, NTT, dan Sulawesi Utara. Mereka merasa RUU tersebut merugikan warga mereka, yang mana mayoritas adalah non Muslim. Walaupun RUU ini mengecualikan pengekspresian kebudayaan tradisional setempat dan seni modern, namun perumusan RUU menunjukkan bahwa ekspresi-ekspresi budaya itu pada dasarnya dianggap pornografi, hanya saja dikecualikan demi kesatuan nasional. Sesuatu yang jauh dari sikap menghormati perbedaan dan keberagaman sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Sementara itu, pertarungan juga berlangsung di DPR, di mana PDIP dan PDS selain menolak RUU juga bahkan melakukan aksi walkout dari sidang. Mereka beralasan bahwa pembahasan RUU terlalu diburu-buru sehingga beberapa pokok penting tak dapat diperdebatkan dalam suasana yang mengedepankan akal sehat. Keterburu-buruan ini tak lain didorong oleh keinginan partai-partai Islam memberikan 'hadiah Lebaran' bagi para konstituennya. Aksi walkout menyebabkan Komisi Perencanaan mengalah dan menjanjikan masa sosialisasi di empat propinsi dan waktu lebih untuk mendengarkan suara-suara yang menolak. PDIP dan PDS akhirnya kembali menghadiri persidangan. Namun para pendukung RUU sudah kukuh dengan pendiriannya dan tidak lagi memberikan konsesi bagi para penentangannya.

Akhirnya pada 28 Oktober 2008, parlemen mengajukan RUU yang tanpa perubahan itu untuk divoting. Tepat sebelum pengambilan suara, seluruh fraksi PDIP dan PDS, ditambah 2 orang anggota fraksi GOLKAR, keluar meninggalkan sidang. Dalam jumpa pers di luar ruang sidang, PDIP menyatakan alasan penolakan adalah karena RUU itu antara lain diskriminatif terhadap kelompok LGBT [lihat bawah]. Mereka juga mengatakan ada banyak pelanggaran prosedural sehingga PDIP tak dapat menjamin keabsahan hukumnya. Bagaimanapun RUU itu lolos disahkan pada 30 Oktober 2008. Selanjutnya ditandatangani oleh Presiden dan kemudian resmi dicatat sebagai UU No. 44/2008.

Di tahun 2008 para anggota DPR semakin banyak memikirkan Pemilu 2009; mereka hanya tertarik pada RUU-RUU yang menyangkut kepentingan mereka. Ada banyak RUU yang menunggu untuk disahkan. Ada peningkatan kefrustrasian terhadap rendahnya kinerja para anggota DPR. Contohnya adalah RUU Pornografi ini. Selain itu para anggota DPR sibuk mengamankan posisinya di pemilu mendatang dan mengumpulkan dana untuk kampanye mereka.

Satu kejadian mencolok yang sangat menyorot bagi kelompok LGBT adalah Kasus Ryan. Nama aslinya adalah Verry Idham Henyansyah, namun ia lebih dikenal sebagai "Ryan si Penjagal dari Jombang". Penangkapannya awalnya terkait kasus ditemukannya potongan-potongan tubuh manusia di sebuah lapangan kosong di Jakarta. Pengakuannya kemudian, membawa pada penemuan 10 mayat yang dikuburkan di halaman belakang rumah orangtuanya di Jombang. Tak butuh waktu lama bagi media massa untuk mengkaitkan kesadisannya akibat kecemburuannya sebagai gay. Pertanyaan yang beredar di masyarakat selanjutnya adalah apakah semua gay seperti itu. Para psikolog dan para kriminolog dimintai pendapatnya; beberapa secara terang-terangan menunjukkan homofobianya, beberapa lagi tidak. Kelompok-kelompok Islam yang ultra-konservatif meneriakan perlunya pengekangan kegiatan-kegiatan dan perkumpulan-perkumpulan gay. Pihak kepolisian akhirnya merazia beberapa klub malam, dan beberapa lainnya ditutup untuk sementara. Lambat laun menjadi jelaslah bahwa motif kesadisan Ryan hanyalah untuk menguasai harta korban-korbannya, dan stigmatisasi oleh media massa pun menyusut. Bagaimanapun juga, kerugian telah terjadi; imej negatif tentang kesadisan gay akan sulit terhapus untuk waktu yang lama.

Ada lagi LGBT yang menjadi korban aparat kepolisian. Masih terkait dengan Kasus Ryan, adalah terungkapnya kesalahan besar yang dilakukan oleh Kepolisian Jombang dalam suatu kasus pembunuhan. Mereka salah mengidentifikasi korban dan mereka pun salah menangkap terdakwa. 2 dari 3 terdakwa sudah divonis sebelum kesalahan itu dapat terbukti. Kasus ini membuktikan bahwa kepolisian masih melakukan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka dan sama sekali tidak mempedulikan tes DNA untuk mengenali korban.

Secara keseluruhan, kondisi HAM secara umum masih statis; budaya impunitas [kebal hukum] malah makin merajalela. Hal ini dapat dilihat dari persidangan terdakwa otak pembunuhan Munir, Jend. (Purn.) Muchdi, yang kemudian dibebaskan dari segala tuduhan. Penyebabnya adalah karena semua saksi kunci akhirnya batal memberikan kesaksiannya tanpa alasan yang jelas. Bagi kelompok LGBT, soal kebal hukum ini dapat dilihat jelas pada Kasus Hartoyo dan Kasus Elly Susana, yang mana pihak kepolisian dicurigai ikut terlibat [lihat bawah].

2 Kegiatan Arus Pelangi

Dalam umurnya yang ke-3, Arus Pelangi telah mengukuhkan posisinya dalam membela hak-hak kelompok LGBT. Kegiatannya dipandu oleh strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah mengenai keberadaan kelompok LGBT beserta isu-isunya. Strategi lainnya adalah untuk menjalin ikatan erat dan membangun aliansi bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya, khususnya yang bergerak di bidang HAM.

2.1 Diskusi Publik

2.1.1 Diskusi Publik Mengenai Islam dan Homoseksualitas

Tujuan diadakannya diskusi publik adalah mengangkat isu-isu sensitif ke tengah masyarakat. Dengan tujuan yang sama, Arus Pelangi mengadakan diskusi publik pada tanggal 28 Maret 2008 dengan isu yang selalu menjadi bahan perdebatan: pandangan para ulama Islam mengenai homoseksualitas. Para pembicara dengan pandangan yang berseberangan diberikan kesempatan

berbicara¹. Perwakilan dari MUI [Majelis Ulama Indonesia] dan dari kelompok sayap kanan HTI [Hisbut Tahrir Indonesia] lantang mengutuk homoseksual. Pembicara lain dari berbagai lembaga riset, seperti Musdah Mulia, lebih positif dalam menafsirkan pandangan Al-Qur'an mengenai homoseksualitas. Musdah terutama secara gamblang menyatakan dalam pidatonya bahwa keberkahan Islam harus diberikan kepada semua makhluk hidup, termasuk LGBT. Debat kecil yang hanya dihadiri oleh 30-an orang ini mungkin tak akan berdampak besar bila tidak diliput luas oleh media massa. Polemik pun meletup dan berlanjut hingga beberapa minggu setelahnya; Musdah pun mendapat teror dan ancaman karena pembelaannya terhadap hak-hak LGBT. Namun ia tetap tegar dan berani, dan akhirnya dianugerahi Yap Thiam Hien Human Rights Award pada Desember 2008.

2.1.2 Peluncuran dan Bedah Buku

Buku ini adalah hasil dari studi pendahuluan mengenai tingkat pelanggaran HAM terhadap LGBT. Sebuah diklat mengenai investigasi pelanggaran HAM dilakukan pada awal 2008 di Jakarta; 20 orang dari kelompok LGBT dari Jakarta, Sukabumi, Surabaya, Yogyakarta, Purwokerto, dan Makassar turut berpartisipasi. Selesai diklat, tiap peserta mulai mengumpulkan data-data pelanggaran HAM terhadap LGBT di daerahnya masing-masing. Sejumlah 13 kasus tersaring untuk diterbitkan dalam buku "Jadi, kamu tak merasa bersalah!? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBT". Kasus-kasus tersebut menunjukkan luasnya diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT; mulai dari pelecehan kecil sampai pembunuhan. Untuk setiap kasus, para peneliti mencoba menentukan tingkat penyelesaian kasus dari sudut pandang korban, juga berbagai sikap para penegak hukum dalam tiap-tiap kasus.

Buku ini resmi diluncurkan pada September 2008 di kantor Komnas HAM. Walau dihadiri oleh sedikit tamu, karena berbarengan dengan sebuah acara lainnya di gedung yang sama, namun buku ini tetap saja dianggap membuahkan terobosan dengan tema dan pendekatannya.

2.2 Advokasi

2.2.1 Advokasi Kasus

2.2.1.1 Kasus Hartoyo

Kasus penyiksaan dan pelecehan seksual ini terjadi pada awal 2007. Seruan aksi (urgent appeal) internasional menghasilkan sejumlah besar surat kepada Pemerintah Indonesia. Indonesia pun menjadi sorotan, sejumlah pelapor khusus untuk PBB mengungkit kasus penyiksaan Hartoyo yang dilakukan oleh Kepolisian Banda Raya Aceh. Komnas HAM mengingatkan Kepolisian Banda Raya Aceh untuk segera mengambil tindakan hukum terhadap para pelakunya. Tiadanya kesaksian dari saksi korban lainnya selalu dijadikan alasan tertundanya kasus ini. Rupanya tekanan internasional melelahkan kepolisian Banda Aceh. Empat orang terdakwa disidangkan pada Oktober 2008, dan Hartoyo yang dipanggil bersaksi secara mendadak, datang sendirian tanpa pendamping hukum.

Persidangan yang dimulai pada 8 Oktober diisi berbagai kejanggalan sedari awal. Pertama, dakwaan diturunkan dari semula tindakan kriminal, menjadi tipiring [tindak pidana ringan]. Kedua, polisi penyidik bertindak juga sebagai penuntut. Ketiga, hanya ada satu hakim dari biasanya tiga orang hakim. Hakim memulai sidang dengan berceramah mengenai perilaku Hartoyo yang dinilai berdosa. Dia malah meminta Hartoyo untuk memaafkan para pelaku yang sudah mengaku bersalah sebelumnya. Vonis pun keluar secara mendadak: tiga bulan masa percobaan tanpa masa tahanan karena mereka pejabat yang sangat dibutuhkan oleh Negara.

¹ <http://www.kompas.com/read/xml/2008/03/28/0004428>

Tentu saja Hartoyo marah atas 'dagelan' tersebut, namun dia tak berdaya karena dia tidak didampingi ahli hukum seorangpun. Sekembalinya di Jakarta, sebuah koalisi yang melibatkan Arus Pelangi dibentuk untuk membalik vonis tersebut. Sebuah surat keberatan diajukan kepada Komisi Yudisial²; isinya membuktikan kesalahan prosedur dalam penegakan hukum, sebuah video rekaman peradilan pun disertakan. Atas bantuan Arus Pelangi, seruan aksi internasional pun kembali diajukan. Komisi Yudisial kemudian meminta Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan catatan jalannya persidangan; namun sampai sekarang hal ini tidak menghasilkan apa-apa.

2.2.1.2 Kasus Elly Susana

Kasus ini terjadi pada November 2007. Elly Susana meninggal tenggelam karena dikejar oleh petugas Satpol PP yang sedang melakukan razia di Taman Lawang, Jakarta. Beberapa korban lainnya ditahan, banyak yang dipukuli, sisanya lolos melarikan diri atau melompat ke kali banjir dekat lokasi razia. Memang beginilah bagaimana penegak hukum biasanya menangani PSK. Elly Susana tidak dikenal sebagai PSK, dia menjalankan usaha salonnya sendiri. Dia datang ke sana untuk mengundang kawan-kawan waria untuk sebuah acara 'gathering'. Namun di mata petugas Satpol PP, semua waria di sana pastilah PSK. Di tengah kepanikan razia, tak ada saksi yang dapat menceritakan bagaimana jatuhnya Elly Susana ke dalam kali. Namun satu hal yang diketahui dengan pasti, dia tak bisa berenang. Keesokan hari setelah razia, tubuh Elly Susana ditemukan terhanyut mengambang beberapa kilometer dari lokasi razia.

Arus Pelangi membantu mengatur otopsi, pemakaman, pencarian saksi, membuat surat pernyataan bagi pihak kepolisian, dan memasukkan laporan kepada Komnas HAM. Arus Pelangi juga menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota menuntut penjelasan atas kebrutalan petugas Satpol PP. Reaksi yang didapat sejauh ini adalah penyangkalan atas insiden tersebut. Sampai kini, pihak kepolisian dan Komnas HAM telah sangat menunjukkan kerjasamanya. Tapi beda dengan Satpol PP yang malah menyangkal telah melakukan razia pada malam itu. Sejauh ini Arus Pelangi telah menahan diri untuk tidak mengajukan seruan aksi internasional, namun sepertinya telah tibalah saat itu.

2.2.1.3 Kasus Ryan dari Jombang

Pembunuhan disertai mutilasi terhadap Heri Santoso, 40 tahun, pada Juli 2008 di Jakarta menarik perhatian banyak pihak. Verry Idham Heryansyah, si tersangka, ketika tertangkap mengakui bahwa motifnya adalah kecemburuan. Ia akhirnya mengakui membunuh juga 10 korban lainnya, kesemuanya dikubur di halaman belakang rumah orangtuanya. Peliputan oleh media mencapai puncaknya ketika satu per satu dari kesepuluh korban tersebut digali. Pengakuan terbukanya sebagai seorang gay menimbulkan spekulasi liar di masyarakat apakah kelompok gay lebih cenderung melakukan tindakan kriminal dan kesadisan. Media pun cepat mengeksploitasi sentimen ini; sederet kriminolog, psikolog, dan seksolog dihadirkan dalam berbagai acara televisi atau wawancara media cetak. Media pun memintai komentar dari organisasi-organisasi gay, namun hanya sebagian kecil yang berani memberikannya. Arus Pelangi adalah salah satu organisasi yang berani bersuara mewakili kelompok gay; selama sehari-hari Arus Pelangi menerima beberapa permintaan wawancara dari jurnalis³. Arus Pelangi sampai-sampai harus menugaskan staffnya secara bergulir untuk melayani permintaan-permintaan dari media. Akibatnya, nama Arus Pelangi semakin berkibar dan menjadi ikon nasional. Jumlah aplikasi keanggotaan pun meningkat pada masa itu.

Sementara itu, stigmatisasi luas mengenai kelompok gay mulai menunjukkan pengaruhnya di pikiran masyarakat; banyak pemimpin agama yang berteriak meminta pembatasan aktivitas

² <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/14/1/153784/ketua-ky-ada-peradilan-sesat-di-kasus-penyiksaan-gay>

³ www.fridae.com/newsfeatures/article.php?articleid=2292&viewarticle=1

kelompok gay. Tekanan dari masyarakat rupanya mendorong kepolisian untuk melakukan sesuatu.

Tabloid Nonstop pada 4 Agustus mengabarkan tentang razia pada diskotik gay terkenal, Moonlight, dan menangkap sekitar 100 orang gay. Alasannya adalah untuk mencari orang yang mengenal Ryan. Pada kenyataannya, polisi tak melakukan satu pun penahanan; manajemen Moonlight didampingi oleh staff dari Arus Pelangi berhasil meyakinkan kepolisian tidak perlunya penahanan bila tujuannya hanya untuk mendapatkan informasi tersebut. Akhirnya kepolisian mencari narkoba; mereka hanya menemukan beberapa pil Ekstasi terserak di lantai. Pemberitaan berlebihan seperti ini sering dilakukan oleh tabloid-tabloid haus sensasi semacam Nonstop; namun kali ini mereka sudah kelewatan dengan mengabarkan berita bohong.

2.2.1.4 Kasus Michelle Saraswati

Kasus Michelle adalah kasus yang agak beda. Ia seorang gay yang awalnya pergi ke AS untuk mencari pekerjaan sebagai arsitek. Ketika sudah melewati batas masa visanya dia mulai merubah gendernya menjadi perempuan. Ketika akhirnya ia tertangkap sebagai pendatang gelap, ia mengajukan suaka atas dasar ketakutan akan keselamatan hidupnya bila ia harus membangun kehidupan baru sebagai seorang transeksual di Indonesia. Kasusnya akhirnya disidangkan di Peradilan Imigrasi di San Fransisco, California. Untuk memenangi kasusnya, dia sangat membutuhkan saksi ahli mengenai kehidupan transeksual di Indonesia. Pengacaranya mendekati berbagai organisasi LGBT di Indonesia, dan Arus Pelangi adalah satu-satunya yang bersedia memberikan kesaksian ahli. Pada hari persidangan tanggal 7 Juli 2008, sebuah sambungan telepon dihubungkan dari ruang sidang di San Fransisco dengan Jakarta. King Oey dari Arus Pelangi, selama lebih dari satu jam menjawab berbagai pertanyaan dari hakim, penuntut, dan pembela. Hakim pun kemudian menyimpulkan bahwa keselamatan Michelle kemungkinan besar terancam bila ia dikirim kembali ke Indonesia; hakim pun mengabulkan permohonan suaka Michelle⁴.

2.2.1.5 Kasus-kasus Lainnya

Ada beberapa kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap LGBT lain yang terjadi di 2008. Sayangnya Arus Pelangi memiliki keterbatasan sumber daya untuk menginvestigasi dan menangani kesemuanya. Beberapa di antaranya berhasil diselesaikan berkat bantuan organisasi lain, beberapa malah dapat diselesaikan oleh kepolisian sendiri, namun ada beberapa juga yang sama sekali tidak tertangani.

2.2.2 Reformasi Hukum

Pengawasan perancangan UU baru dan diskusi-diskusi publik adalah bentuk advokasi yang tidak menyedot terlalu banyak sumber daya. Hambatannya adalah bila pembahasan RUU baru berlanjut terlalu panjang, atau bila pengesahan suatu RUU sudah digodok sebelumnya, maka keterbatasan sumber daya akan menyulitkan keterlibatan Arus Pelangi. RUU yang telah disahkan membutuhkan pendekatan yang berbeda dan sumber daya yang lebih banyak pula. Sejauh ini Arus Pelangi lebih banyak melakukan kampanye 'negatif', yaitu berkampanye menentang RUU yang diskriminatif terhadap LGBT. Kampanye positif, di sisi lain, membutuhkan sumber daya lebih, yang saat ini belum tersedia.

2.2.2.1 UU Pornografi

Dalam perlawanannya menentang UU Pornografi, Arus Pelangi bergabung ke dalam Aliansi Masyarakat Sipil Menolak Pengesahan RUU Pornografi. Kampanye pengumpulan tandatangan pun dilakukan. Aliansi ini mengadakan diskusi publik berbentuk Fit-and-Proper test pada 19 September 2008 di Jakarta Media Center. Acara itu dihadiri oleh ratusan orang dari aktifis HAM,

⁴ www.thejakartapost.com/news/2008/08/10/us-grants-asylum-indonesian-transgender-case.html

seniman, sampai kelompok adat minoritas, dll. Media pun beramai-ramai meliput, dan tanpa disangka, isu LGBT pun menjadi perhatian besar di media massa⁵.

Sementara itu, Arus Pelangi bekerja intensif dengan anggota-anggota DPR yang simpati dengan LGBT, mengkoordinasikan langkah-langkah kebijakan, dan saling memberikan sokongan dalam menghadapi berbagai cercaan dari kelompok pro RUU. Kelompok LGBT berhasil mencatat kemenangan kecil ketika PDIP secara terbuka menyatakan perlawanannya terhadap RUU itu karena suatu paragraf yang diskriminatif terhadap LGBT⁶; inilah pertama kalinya dalam sejarah, sebuah partai politik secara terbuka mendukung hak-hak LGBT.

Setelah pengesahan RUU tersebut, Arus Pelangi menggelar diskusi bersama konstituennya untuk mengukur kesiapan melanjutkan perlawanan⁷. Hadirin yang berjumlah 40 orang secara aklamasi mendukung langkah untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi sebuah koalisi sipil dibentuk untuk menyiapkan argumen-argumen dan bahan lainnya. Koalisi Bhineka Tunggal Ika ini dikoordinasi oleh YLBHI, dengan Arus Pelangi sebagai salah satu anggota teraktif dan konstruktif. Petisi untuk Judicial Review akan diajukan pada Februari 2009.

2.2.2.2 Peraturan Daerah yang Diskriminatif

Ini adalah bentuk kampanye dari tahun-tahun sebelumnya. Tak banyak yang dilakukan pada tahun ini, karena pada dasarnya bola sudah ada di tangan Departemen Dalam Negeri. Merekalah yang harus menentukan cara untuk bertindak terhadap perda-perda 'moralitas' yang berlawanan dengan perundang-undangan negara dan bahkan UUD 1945.

Satu-satunya kegiatan yang diprogramkan adalah seminar mengenai suatu peraturan daerah di Palembang yang dihadiri oleh kalangan akademisi hukum setempat. Seminar ini dilaksanakan pada Maret 2008 di Palembang, Sumatera Selatan. Kesimpulan dari seminar ini adalah bahwa pembuat peraturan di Palembang telah melakukan kesalahan besar dalam perancangannya karena tidak melakukan konsultasi dahulu dengan ahli-ahli hukum.

2.2.2.3 Hukum Anti Diskriminasi

UU Anti Diskriminasi berdasarkan ras dan etnis diajukan semenjak 2006. UU ini disahkan bersamaan waktunya ketika UU Pornografi sedang hangat diperdebatkan. Sebuah grup lobi yang didanai oleh kelompok etnis Cina bergerak di belakang layar. Sangat disayangkan UU ini tidak diperluas dengan memasukkan kelompok minoritas lainnya seperti LGBT, penyandang cacat, agama minoritas, korban narkoba, dll.

2.2.2.4 KUHP yang Baru

Beberapa dekade telah berlalu dan penyusunan KUHP [Kitab Hukum Pidana] baru untuk menggantikan hukum pidana peninggalan Belanda belum juga rampung. Beberapa kali ada yang mencoba, dengan berbagai cara, untuk memasukkan tindakan homoseksual sebagai tindakan pidana. Pengawasan yang seksama diperlukan untuk menghindari hal tersebut sampai terjadi.

Terkait dengan hal diatas, adalah revisi KUHP yang sudah diperdebatkan selama 4 tahun. Arus Pelangi terutama menyorot soal perlindungan bagi para tersangka dan saksi, khususnya bila mereka adalah LGBT. Untuk memberantas kekerasan rumah tangga, kepolisian telah membentuk RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di tingkat propinsi; disediakan bagi para wanita dan anak-anak yang menjadi korban KDRT [kekerasan rumah tangga] dan dijalanakan oleh personel khusus. Arus Pelangi berjuang agar RPK juga dapat melayani kelompok LGBT.

⁵ <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/25/1/149322>

⁶ http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=350635

⁷ <http://www.thejakartaglobe.com/life-times/article/2368.html>

Sebuah koalisi yang terdiri atas LBH-APIK, LBH-M, ILRC, HUMA, LBH-Mawar Sharon, LBH Jakarta, dll, bersama-sama mengawasi kelanjutan penyusunan tersebut. Di luar menyuarakan suara masyarakat, Arus Pelangi tetap menjalin kontak dengan para pembuat hukum yang pro LGBT, termasuk di sini adalah PDIP.

2.3 Kegiatan Jaringan

2.3.1 ILGA

Arus Pelangi sudah menjadi anggota ILGA [International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersexual Association] pada 2006. Pada 2008 Arus Pelangi menghadiri konferensi ILGA-Asia di Chiang-Mai, Thailand. Tiga delegasi Indonesia, termasuk Arus Pelangi, terpilih sebagai anggota dewan regional⁸.

Arus Pelangi juga menghadiri ILGA World Conference di Vienna, Austria pada November 2008. Di luar agenda tetap, Arus Pelangi juga mengambil bagian dalam kaukus negara mayoritas Muslim. Konferensi itu sangat memberikan angin segar karena keberagamannya.

Melanjuti ILGA World Conference, sekretariat ILGA memohon kepada para anggotanya untuk melobi pemerintahannya masing-masing untuk mendukung pernyataan mereka mengenai perlindungan HAM bagi orang dengan orientasi seksual dan jatidiri gender yang berbeda, yang akan dikeluarkan pada Sidang Umum PBB ke-36 mendatang. Arus Pelangi telah melakukan upaya sekuatnya untuk melobi pihak-pihak terkait, namun karena keanggotaan Indonesia dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) pemerintah tidak berani mengambil risiko bila mendukung isu tersebut. Bagaimanapun, melalui kontak-kontaknya, Arus Pelangi secara tidak langsung berhasil mendorong pemerintahan Timor Leste agar mendukungnya. Alhasil, Timor Leste adalah 1 dari 4 negara Asia, di antara 66 negara dunia lainnya, yang ikut menandatangani pernyataan tersebut pada 18 Desember 2008⁹.

2.3.2 Forum Nasional LGBTIQ

Inisiatif atas forum ini datang dari GFW (Global Fund for Women) dari AS yang memiliki perhatian besar terhadap gerakan LGBT di Indonesia. Arus Pelangi berperan penting dalam diskusi-diskusi utama. Hal ini juga adalah kelanjutan tak terduga dari lokakarya yang diadakan oleh Hivos di Bogor, di mana empat mitra LGBT mengembangkan platform bersama untuk advokasi LGBT. Beberapa inisiatif konkret telah mencuat dalam forum ini, seperti perayaan IDAHO (International Day Against Homophobia / Hari Internasional Melawan Homofobia), dan juga deklarasi Yogyakarta Principles [lihat bawah].

2.3.3 Hari Buruh

Sekarang ini, Hari Buruh tidaklah lengkap bila tidak diikuti kontingen waria yang diorganisir Arus Pelangi. Kondisi orang-orang transgender/transseksual belum berubah banyak; mereka masih ditekan untuk mengikuti norma-norma mayoritas masyarakat dalam hal mendapatkan lapangan pekerjaan.

2.3.4 IDAHO

Salah satu kegiatan yang termasuk dalam platform gabungan adalah pengorganisasian terkoordinasi dalam merayakan IDAHO. Kelompok-kelompok dari empat kota berbeda bersepakat mengadakan serangkaian kegiatan secara berbarengan. Setiap kota memiliki pusat

⁸ www.fridae.com/newsfeatures/article.php?articleid=2157&viewarticle=1

⁹ http://ilga.org/news_results.asp?LanguageID=1&FileID=1211&FileCategory=44&ZoneID=7

koordinasinya masing-masing. Kegiatannya meliputi pameran foto, pemutaran film, diskusi publik, aksi jalan, dan bhakti sosial untuk fakir miskin. Perayaan di Makassar, Yogyakarta¹⁰, dan Jakarta¹¹ mendapatkan liputan luas dari media massa.

2.3.5 International Transgender Day

Karena keterbatasan dana, Arus Pelangi hanya dapat mengadakan serangkaian acara radio talkshow yang menghadirkan beberapa orang waria yang menyuarakan keprihatinan mereka dan pentingnya International Transgender Day (20 November). Beberapa pendengar memberikan tanggapannya dan umumnya adalah tanggapan positif.

2.3.6 Deklarasi Yogyakarta Principles

Kampanye ini dimotori oleh IGLHRC [International Gay & Lesbian Human Rights Commission] untuk diadakan di tiga negara: Filipina, Thailand, dan Indonesia. Dalam kesempatan ini IGLHRC beraliansi dengan organisasi-organisasi lesbian walau akhirnya juga melibatkan organisasi-organisasi LGBT lainnya. Ardhanary Institute, sebuah organisasi LBT perempuan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mencakup diskusi publik, aksi jalan, dan pemasangan spanduk pada Human Rights Day pada 10 Desember di Yogyakarta. Arus Pelangi dan mitra-mitra LGBT lain mengambil peran aktif pada acara tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 100 orang dari seantero Indonesia, dan beberapa delegasi dari Thailand dan Filipina.

2.4 Pengorganisasian Kelompok LGBT Lokal

Arus Pelangi berperan kecil pada bidang ini tahun ini; karena terhambat berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal. Arus Pelangi Banyumas telah non-aktif karena kelemahan manajemen dan konflik internal. Arus Pelangi mencoba menengahi konflik tersebut namun mendapati bahwa upaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya berada di luar batas kapasitas Arus Pelangi.

Di sisi lain, PLU-Satu Hati di Yogyakarta, dan Komunitas Sehati di Makassar malah berkembang semakin kuat. Mereka telah beberapa kali sukses mengadakan kegiatan-kegiatan sendiri. Berkat upaya mereka telah berdiri satu pondok pesantren yang menerima kaum waria seadanya¹². Mereka juga telah menunjukkan kuatnya kekompakan di antara para anggotanya.

Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) jaringan transgender (MTF) yang terus berjuang menuju suatu organisasi yang terpercaya. Arus Pelangi bersama FKWI dan organisasi transgender lainnya telah bekerja keras untuk menyelenggarakan pertemuan nasional yang pertama untuk kelompok transgender/transseksual yang sayangnya baru dapat dilaksanakan di awal 2009.

2.5 Pendidikan terhadap Isu-Isu LGBT

Pada 2007, dua LSM dari Swedia, RFSU dan RFSL, mengadakan pelatihan internasional tentang "LGBT dan HAM" dengan peserta dari 8 negara Asia. Peserta dari Indonesia hanyalah Arus Pelangi. Pelatihan lanjutannya dilaksanakan di Bali pada awal Juni 2008¹³. Lokasi pelatihan menyebabkan Arus Pelangi diminta untuk mengatur urusan logistik lokal oleh panitia dari Swedia dan Arus Pelangi pun diberi peran penting dalam pokok-pokok pelatihannya. Secara

¹⁰ <http://old.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20080601.F02>

¹¹ http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=341240

¹² <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/17/06232748/ketika.para.waria.mencari.tuhan...>

¹³ <http://www.thejakartapost.com/news/2008/06/09/asian-gay-transgender-groups-fight-their-rights.html>

keseluruhan, pelatihan tersebut telah juga mengembangkan sayap Arus Pelangi di tingkat internasional. Selain itu juga memberi masukan berharga mengenai advokasi tingkat internasional berdasarkan pengalaman negara-negara Asia lainnya. Bahkan hubungan dengan RFSL menjadi semakin erat setelahnya.

Arus Pelangi juga secara aktif terlibat dalam mendidik kelompok-kelompok lainnya; umumnya diarahkan pada para anggota LGBT baik yang berada di dalam maupun di luar Jakarta. Tahun ini Arus Pelangi menyelenggarakan dua pelatihan: Yang pertama adalah tentang HAM Dasar, dan yang kedua adalah Penguatan Keorganisasian. Keduanya diikuti antara 20-30 orang dan umumnya dari luar Jakarta.

Cara pendidikan lain yang lebih informal juga sama pentingnya, seperti penguatan LGBT dalam proses 'coming-out' dan 'reaching-out'. Bentuknya kegiatannya di antaranya adalah pemutaran film disertai diskusi kecil, dan rata-rata dihadiri antara 30-40 orang. Muka-muka baru selalu bermunculan di setiap acara, mengindikasikan pentingnya kawan dari kawan sebagai calon anggota baru bagi Arus Pelangi.

Ada satu lagi pendidikan dalam bentuk khusus yang dijalankan oleh Arus Pelangi, yaitu layanan Hotline yang telah berjalan sejak 2007. Layanan ini selain menerima telepon baik dari LGBT maupun bukan; mereka bertanya soal orientasi seksual, masalah berpasangan, 'coming out' dll. Tidak jarang Hotline mendapat telepon dari orang yang tujuannya hanya ingin mencerca dan mencemooh.

2.6 Penguatan Keorganisasian

Keaktifan para anggota dijadikan tolak ukur oleh Arus Pelangi. Pada bulan Februari, Arus Pelangi mengadakan acara pengangkatan anggota secara nasional di mana semua calon anggota resmi terdaftar dan mendapat kartu keanggotaan. Anggota terdaftar berjumlah 350 orang namun acara tersebut hanya dapat dihadiri oleh sekitar 80 orang karena faktor cuaca yang buruk. Dalam acara tersebut juga melahirkan kesepakatan untuk merayakan IDAHO serempak di 4 kota.

Manajemen keanggotaan dikembangkan menjadi sebuah database. Para anggota yang berada di Jakarta umumnya diundang dalam acara dan kegiatan Arus Pelangi. Mereka juga mendapatkan kiriman majalah OutZine. Mendekati akhir 2008, Arus Pelangi juga mengadakan Pilot Project untuk mendorong para anggotanya berekspresi, yaitu: AP Dancers dan ATAP (Anak Teater AP).

Selama 2008, sekretariat Arus Pelangi mengalami penurunan jumlah staf. Penyebabnya beberapa hal; ada yang karena perbedaan kepentingan dan etika kerja, ada yang karena berkurangnya sumber dana. Pengurangan jumlah staff ini tentu saja secara langsung juga berdampak pada kegiatan-kegiatan Arus Pelangi.

3 Kesimpulan

Selama tahun 2008 Arus Pelangi tetap kuat dalam advokasi, kampanye, maupun hubungan masyarakatnya. Terjadi sedikit penurunan dalam bidang keorganisasian dan pendidikan. Di tingkat internasional, Arus Pelangi mendapat reputasi kokoh sebagai pejuang advokasi bagi LGBT Indonesia.

4 Isu-isu di Masa Datang

- ASEAN Human Rights Body
- KUHP dan KUHAP

- Judicial Review UU Pornografi
- Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
- Diskriminasi di tempat kerja
- Pengembangan kapasitas
- Rapat Umum Anggota
- Manajemen keanggotaan.

